

ABSTRAK

Pertambangan Emas Tanpa Izin merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin tentunya merupakan suatu bentuk tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kalimantan Tengah sebagai salah satu Provinsi yang mempunyai kandungan emas yang cukup tinggi, tentunya tidak bisa terlepas dari banyaknya kegiatan pertambangan ilegal. Sehingga diperlukan adanya peran dari Polri khususnya Polda Kalimantan Tengah untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin, Bagaimana Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris dengan metode penelitian *deskriptif analitis*. Sumber data diambil dari data primer dan sekunder dengan teknik pengumpul data, yaitu pengamatan atau *observasi*, wawancara atau *interview* dan kuesioner kepada responden. Analisa permasalahan dilakukan dengan Teori Penanggulangan Kejahatan, Teori Penegakan Hukum dan Teori Faktor-Faktor Penegakan Hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin dengan menggunakan pendekatan *penal* dan *non penal* melalui upaya Pre-emptif, Preventif dan Represif. Terhadap pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin telah diproses dan dinyatakan bersalah karena telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam upaya penegakan hukum tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yang meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Peran Polri, Penanggulangan, Pertambangan Emas Tanpa Izin.

ABSTRACT

Unlicensed Gold Mining is a mining business carried out by individuals, groups of people, or companies with legal entities that do not have licenses and government institute in accordance with the applicable laws and regulations. In Indonesia, unlicensed mining activities are certainly a form of crime as regulated in the law of the republic of Indonesia number 4 of 2009 on mineral and coal mining. As a province that has a high gold content, Central Kalimantan certainly cannot be separated from the number of illegal mining activities. so that the role of the national police is needed, especially the Central Kalimantan regional police to overcome these problems.

the purpose of this study is to find out how the role of the national police in unlicensed gold mining crime, how the process of law enforcement againts the perpretrators of unlicensed gold mining crime and what factors that influence law enforcement againts perpretrators of unlicensed golf mining crime in Central Kalimantan.

This study uses normative juridical approach and empirical juridical with analytical descriptive research methods. Data sources are taken from primary and secondary data with data collection techniques, such as observation, interviews, and questionnaires to respondents. Problem analysis is carried out with crime reduction theory, law enforcement theory and law enforcement factors theory.

The results showed that, Indonesian national police role in unlicensed gold mining crime countermeasures by using the punitive and non-penal approaches through pre-emptive, preventive, and repressive efforts. The perpetrators of unlicensed gold mining crimes have been processed and found guilty because of unlicensed mining activities as regulated in the law of the republic of Indonesia number 4 of 2009 on mineral and coal mining. In law enforcement efforts, there are factors that influence the effectiveness of law enforcement which include legal factors, law enforcment factors, supporting facilities, community factors and cultural factors..

Keywords: Role of the Indonesian National Police, Countermeasures, Unlicensed Gold Mining.